

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Menurut Azyumardi Azra dalam Aulia (2012 : <http://eki-blogger.blogspot.com/2012/05/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan.html>) bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan, *civics education* dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, *global society*.

Berdasarkan kutipan di atas, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik atau sering disebut *to be good citizenship*, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tumbuh rasa cinta tanah air. Selain itu juga mendidik warga negara Indonesia menjadi warga dunia yang mampu ikut serta dalam kegiatan secara global.

Seperti yang dikutip Nu'man Somantri dalam Sri Wuryan (2009: 76) bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia (*basic human activities*) yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan PKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, artinya bukan hanya membangun warga negara yang baik (*good citizen*) semata melainkan warga negara yang cerdas (*Smart citizen*) dalam menghadapi lingkungan kehidupannya. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat tantangan kehidupan saat ini tidak cukup dan dapat diselesaikan hanya oleh warga negara yang baik melainkan perlu pula oleh warga negara yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh warga negara adalah kecerdasan dalam berbagai aspek, yakni kecerdasan dalam intelektual, emosional, sosial, dan bahkan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berfikir dalam menganalisis berbagai masalah. Dalam hal ini, seorang warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan atau kecakapan (*skill*), meliputi keterampilan meneliti untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Definisi pendidikan kewarganegaraan diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat, tetapi esensinya sama, apabila disimpulkan bermakna jelas, bahwa pendidikan kewarganegaraan memanfaatkan konsep-konsep pendidikan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran siswa di sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yang bermoral untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam bela negara. Dalam kaitan ini diartikan bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan siswa mampu menumbuhkan kesadaran akan bernegara dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan kewarganegaraan tidak terbatas pada manfaat penyempurnaan kognitif atau afektif saja. Kita harus melihat pendidikan kewarganegaraan pada bidang yang lebih luas,

sebagai salah satu proses pembentukan kualitas pikiran dan sikap yang berlandaskan asas-asas moralitas. Pendidikan kewarganegaraan yang tradisional banyak menekankan pembelajarannya pada peningkatan kognitif saja padahal, salah satu tugas dari pendidikan kewarganegaraan pun adalah meningkatkan pengertian anak tentang pengetahuan, pemahaman dan aplikasinya di dalam kehidupan, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Domain psikomotor yang mencakup aspek pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan perkembangan konseptual motorik menegaskan bahwa upaya pendidikan kewarganegaraan langsung melalui pemahaman belajar siswa sebagai perantara untuk tujuan yang bersifat mendidik, dan sekaligus untuk tujuan yang bersifat pembentukan serta pembinaan sikap siswa itu sendiri. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Aspek kognitif dalam pendidikan kewarganegaraan tidak saja menyangkut penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan namun pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan politik.

Pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak kalah penting dibandingkan dengan pelajaran lain seperti : Matematika, Bahasa, IPA, IPS, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak semua guru pendidikan kewarganegaraan menyadari hal tersebut, sehingga banyak anggapan bahwa pendidikan kewarganegaraan boleh dilaksanakan secara serampangan. Hal ini tercermin dari berbagai hal negatif tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, mulai dari kelemahan proses yang menetap misalnya tidak melihat seluruh aspek – aspek pendidikan yang harus dinilai. Di kalangan guru pendidikan kewarganegaraan sering ada anggapan implementasi hasil belajar siswa dalam kehidupan tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pemahaman siswa terhadap materi ajar yang diberikan. Ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri yang mengharuskan memberikan penilaian dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor yang kelak diharapkan mampu memberikan kontribusi positif siswa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pendidikan sangat penting guna mempersiapkan diri untuk lebih mengembangkan potensi diri dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam proses pembelajaran pun dikenal dengan evaluasi belajar. Menurut Mehrens dan Lemans dalam M. Ngalim Purwanto (2008 : 3) evaluasi dalam arti luas adalah "suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan".

Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba untuk membuat suatu keputusan. Dalam hubungan dengan kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam pengajaran. Karena itu kemampuan melakukan penilaian merupakan bagian dari kemampuan guru melaksanakan pengajaran.

Norman E. Gronlund dalam M. Ngalim Purwanto (2008 : 3) merumuskan pengertian evaluasi adalah "suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa."

Berdasarkan kutipan di atas, ini berarti bahwa evaluasi dalam pengajaran merupakan kegiatan yang terencana yang dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama

program berlangsung, dan pada akhir program setelah program itu dianggap selesai.

Paradigma masyarakat yang timbul tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah bahwa siswa cukup memahami dalam lingkup perkembangan kognitif atau afektif. Padahal dalam hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang mampu menghasilkan perubahan secara menyeluruh, jadi bukan hanya perkembangan atau perubahan siswa dalam aspek kognitif atau afektif saja yang berkembang, namun aspek psikomotor pun senantiasa harus dikembangkan.

Pendidikan kewarganegaraan yang tradisional banyak menekankan pembelajarannya pada peningkatan pemahaman materi saja padahal, salah satu tugas dari pendidikan kewarganegaraan pun adalah meningkatkan pengertian anak tentang demokrasi politik, serta berbagai hal yang berkaitan mengenai pelaksanaan politik.

Berdasarkan hasil prapenelitian pada tanggal 4 sampai 9 April, masih banyak masalah yang ditemukan berkenaan dengan penetapan kriteria ketuntasan minimal oleh satuan pendidikan, di antaranya :

1. pada umumnya sekolah sudah menyusun KKM yaitu 85, namun tidak menyimpan hasil analisis KKM yang telah dilakukan karena mereka belum tahu bahwa berkas KKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KTSP, sehingga berkas analisis tidak ada di bagian kurikulum;
2. Masih banyak guru yang belum mengetahui bahwa KKM yang disusun sudah benar atau belum dan sejumlah guru belum memahami secara benar tentang penerapan kriteria kompleksitas, daya dukung, dan intak siswa dalam penyusunan KKM. Salah satu guru PKn mengatakan bahwa nilai KKM diperoleh dari nilai – nilai tugas, ulangan harian dan UTS;
3. Beberapa guru menetapkan KKM tanpa proses analisis, Penetapan KKM berdasarkan pengalaman guru mengajar dan atau kesepakatan dengan guru

mata pelajaran sejenis, dan koordinasi dengan pihak sekolah yang lain seperti pihak kurikulum dan kepala sekolah; dan

4. Panduan penetapan KKM kurang operasional dan belum dilengkapi dengan contoh-contoh proses penentuan KKM sehingga guru yang tidak mengikuti bimtek tidak dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan panduan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sering kali di setiap sekolah-sekolah, acuan penilaian atau hasil belajar siswa hanya dilihat dari sisi domain afektif dan kognitif saja aspek psikomotor sering kali dilupakan. Padahal melalui ketiga domain pembelajaran tersebut siswa mampu menjadi seorang pribadi yang cerdas, kuat, dan mampu memiliki rasa sosial yang tinggi.

Tabel 1.1

Nilai rata-rata kelas VII siswa SMP Negeri 5 Bandung

Kelas	Ulangan harian	Tugas	Rata-rata
VII A	91	92	91
VII B	92	93	92,5
VII C	94	93	93,5
VII D	80	90	89,5
VII E	87	90	88,5
VII F	90	90	90
VII G	86	90	88
VII H	87	90	88,5
VII I	88	90	89

Sumber: kurikulum SMP N 5 Bandung.

Berdasarkan dari data di atas, bahwa kriteria ketuntasan minimal SMP Negeri 5 Bandung adalah 85, dan nilai rata-rata kelas VII di SMP Negeri 5 Bandung semuanya di atas nilai KKM, yang menandakan bahwa nilai setiap kelas

di atas nilai ketuntasan minimum. Dari data tersebut pula, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam, apa saja yang dilakukan guru dalam memperoleh dan mengumpulkan nilai tersebut sehingga di dapat nilai rata-rata tersebut. Dari data di atas, nilai rata-rata kelas didapat dari penggabungan nilai harian dan nilai ulangan yang kemudian dirata-ratakan. Sedangkan idealnya, dalam penilaian itu sendiri perlu adanya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga setiap perilaku siswa dalam proses dan hasil belajar dapat dilihat dari saat proses pembelajaran berlangsung. Apakah siswa tersebut layak memperoleh nilai tinggi dari hasil ulangannya, sedangkan siswa tersebut tidak hormat terhadap teman bahkan gurunya pun sendiri, apa lagi jika dikaitkan dengan pelajaran PKn yang berhubungan dengan moral.

Seperti yang dikutip dalam M. Ngalim Purwanto (2008: 7) peran sekolah dan guru – guru yang pokok diantaranya adalah "menyediakan dan memberikan fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa". Dari kutipan tersebut guru harus dapat mengembangkan kegiatan – kegiatan yang membantu siswa meningkatkan cara dan hasil belajarnya. Akan tetapi, di samping itu kadang – kadang guru merasa bahwa evaluasi itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan pembelajaran. Hal ini timbul karena sering kali terlihat bahwa adanya kegiatan evaluasi justru merisaukan dan menurunkan semangat belajar siswa, pendapat yang seperti itu pada hakikatnya tidak sesuai dengan pengertian evaluasi sendiri. Pada kenyataannya, penilaian yang dilakukan secara tidak benar dapat mematikan semangat siswa dalam belajar, sebaliknya penilaian yang baik dan benar dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar karena kegiatan evaluasi itu membantu guru untuk memperbaiki cara mengajar dan membantu siswa dalam meningkatkan cara belajarnya.

Adanya faktor profesionalitas guru dan siswa yang kurang berkompeten dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar yang seharusnya dilaksanakan sesuai mekanismenya menyebabkan hasil belajar siswa terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: ***STUDI KOMPETENSI GURU DAN SISWA DALAM PENILAIAN BERBASIS KKM MATA PELAJARAN PKN.(Studi Analisis terhadap Proses Penilaian dan Hasil Penilaian dalam Pelajaran PKN di SMP Negeri 5 Bandung)***

B. Rumusan dan Fokus Kajian

Dari latar belakang masalah tersebut dapat kita simpulkan masalah pokok dari penelitian ini yaitu bagaimana kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Bandung. Untuk mempermudah pembahasan hasil penelitian maka masalah pokok tersebut dijabarkan dengan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana guru merencanakan dan mengimplementasikan penilaian berbasis KKM mata pelajaran PKN di SMP Negeri 5 Bandung?
2. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan guru PKN berbasis KKM?
3. Bagaimana hasil belajar siswa berbasis KKM dalam mata pelajaran PKN?
4. Apa kendala yang dialami guru dan siswa dalam ketercapaian penilaian?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam mengatasi kendala-kendala selama proses penilaian dan hasil belajar siswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang proses penilaian dan hasil belajar siswa yang dilaksanakan oleh guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Bandung.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui bentuk dan jenis penilaian yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Bandung.
- b. Untuk mengetahui proses penilaian yang dilakukan di dalam kelas.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi siswa.
- d. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami guru dan siswa dalam ketercapaian penilaian.
- e. Untuk mengetahui upaya guru dan siswa dalam mengatasi kendala-kendala selama proses penilaian dan hasil belajar.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sejauh mana pentingnya dan berperannya proses penilaian dan hasil belajar siswa yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah – sekolah, juga sebagai literatur keilmuan yang kelak mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan pendidikan yang menyeluruh, serta mampu memberikan perubahan dalam proses pembelajaran yang lebih baik.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi bagi guru pendidikan kewarganegaraan dan sekolah tentang kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan dalam proses penilaian dan hasil belajar siswa yang sangat penting di laksanakan sesuai dengan mekanismenya, antara lain :

- a. Diketuainya bentuk dan jenis penilaian yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 5 Bandung.
- b. Diketuainya proses penilaian yang dilakukan di dalam kelas.
- c. Diketuainya sejauhmana kompetensi siswa.
- d. Diketuainya berbagai kendala yang dialami guru dan siswa dalam ketercapaian penilaian.
- e. Diketuainya berbagai kendala yang dialami siswa untuk ketercapaian penilaian.

Dewi Dinar Sari, 2013

Studi Kompetensi Guru Dan Siswa Dalam Penilaian Berbasis Kkm Mata Pelajaran PKn (Studi Analisis Terhadap Proses Penilaian dan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PKn di SMP Negeri 5 Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

E. Struktur Organisasi Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN: Latar belakang, rumusan dan fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA: Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi guru dan siswa, dasar-dasar penilaian pembelajaran PKn, penilaian berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran PKn, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis
3. BAB III METODE PENELITIAN: desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur penelitian, jadwal penelitian
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: gambaran umum SMP Negeri 5 Bandung, profil guru PKN SMP Negeri 5 Bandung, profil siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandung, hasil penelitian kompetensi guru dan siswa dalam penilaian berbasis KKM di SMP N 5 Bandung, pembahasan hasil penelitian
- a. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: kesimpulan, saran